

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah Palestina merupakan isu yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dominasi Yahudi-Zionis dalam aspek militer, politik, dan budaya di Palestina dipandang sebagai tantangan terbesar bagi umat Islam dalam usahanya meraih kemerdekaan, persatuan, dan kebangkitan. Masalah Palestina sendiri tidak dianggap semata-mata sebagai persoalan lokal, melainkan bagian dari agenda besar persekutuan Barat-Zionis yang sejak awal berupaya menciptakan perpecahan dan kelemahan di kalangan umat Islam. Strategi tersebut ditujukan agar umat Islam terus berada dalam posisi subordinat terhadap kekuatan adidaya dunia.¹

Selama periode 1517 hingga 1917, Palestina berada di bawah kendali Turki Utsmani, yang mengintegrasikan wilayah ini ke dalam Provinsi Suriah (*Vilayet Suriah*). Pada masa itu, Palestina mencakup Muttasharifat Jerusalem serta kota-kota seperti Jaffa, Hebron, dan Betlehem.² Kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I (1914-1918) dari Inggris dan sekutunya membawa dampak

¹ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11.

² Dror Ze'evi, *An Ottoman Century: The District of Jerusalem in the 1600s*, (Albany: State University of New York Press, 1996), 121.

besar pada perubahan peta politik di Timur Tengah. Kekuasaan Utsmani atas wilayah tersebut, termasuk Palestina, berakhir.³ Wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris berdasarkan Sistem Mandat yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Inggris bertindak sebagai kekuatan mandat, dan secara resmi mengatur wilayah Palestina dengan dalih mempersiapkan kemerdekaan bangsa Arab. Namun kenyataannya, Inggris secara aktif memfasilitasi imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina dan mendukung pembangunan institusi-institusi Zionis.⁴

Inggris telah lama berusaha menguasai wilayah Palestina dengan dalih keinginan merelokasi orang-orang Yahudi yang menghadapi masalah di Eropa. Namun, Sultan Abdul Hamid II secara konsisten menolak permintaan Inggris dan komunitas Yahudi untuk mendirikan pemukiman resmi di Palestina, meskipun pada saat itu kekuasaan Turki Utsmani sudah semakin melemah.⁵ Kondisi dalam negeri yang lemah membuat Turki Utsmani enggan terlibat dalam konflik militer, namun kekuasaan saat itu berada di bawah kendali pemerintahan militer yang dipimpin oleh Enver Pasha dan Talat Pasha, setelah penggulingan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1908. Pada 22 Juli 1914, Turki Utsmani menawarkan aliansi kepada Jerman, yang diterima oleh

³ Tiar Anwar Bachtiar, *Jas Mewah, Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah & Dakwah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), 170.

⁴ Rashid Khalidi, *Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness*, (New York: Columbia University Press, 1997), 95.

⁵ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina...*, 37.

Wilhelm II pada 2 Agustus 1914, sehingga Turki Utsmani resmi bergabung dengan Blok Sentral.⁶

Inggris menggunakan strategi untuk melawan Aliansi Jerman-Utsmani dengan melibatkan Bangsa Arab agar melawan Turki Utsmani. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan Syarif Husain bin Ali, Emir Mekah, yang bersedia bersekutu dengan Inggris dan setuju untuk memberontak terhadap kekuasaan Utsmani. Pada tahun 1915, mereka melakukan korespondensi yang membahas rencana Inggris terhadap wilayah Arab yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Utsmani.⁷ Inggris menjanjikan kepada Syarif Husain bahwa setelah perang, ia akan mendapatkan Kekhilafahan Arab yang mencakup seluruh semenanjung Arab, termasuk Suriah dan Irak. Negosiasi dan pembahasan terkait pemberontakan tersebut dilakukan melalui surat-menyurat yang dikenal sebagai Korespondensi McMahon-Hussein, di mana Syarif Husain berkomunikasi dengan Sir Henry McMahon, Komisar Besar Inggris di Mesir.⁸

Perang Dunia I ditandai dengan sejumlah pertempuran penting, termasuk kekalahan pasukan Turki Utsmani-Jerman di dekat Terusan Suez pada 1915 dan 1916 oleh Divisi Infanteri ke-

⁶ H.S.W. Corrigan, "German-Turkish Relations and the Outbreak of War in 1914: are-assessment", Past and Present, Vol. 36, 1967, 144-152.

⁷ Randall Baker, *King Husain and the Kingdom of Hejaz*, (Cambridge: The Oleander Press, 1979), 64-65.

⁸ Eugene Rogan, *The Fall of the Khilafah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2018), 346-347.

52. Kemenangan ini menjadikan Inggris terus maju melintasi Sinai, memukul mundur pasukan Utsmani di Pertempuran Rafah pada Januari 1917, yang terletak di perbatasan Gurun Sinai dan Palestina.⁹ Di Semenanjung Arabia, pemberontakan terhadap Turki Utsmani yang dikenal sebagai *Great Arab Revolt* dimulai pada tahun 1916 di bawah kepemimpinan Syarif Husain dari Makkah dengan dukungan T.E. Lawrence dari Pasukan Inggris. Selanjutnya, Pasukan Ekspedisi Mesir yang dipimpin oleh Edmund Allenby berhasil merebut Yerusalem pada 9 Desember 1917 dan menduduki seluruh wilayah Suriah setelah kemenangan atas pasukan Turki di Palestina dalam Pertempuran *Megiddo* pada September 1918.¹⁰

Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I, Turki Utsmani tidak lagi memiliki kuasa untuk mencegah ketika Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang memberikan izin kepada orang-orang Yahudi untuk membangun permukiman di wilayah tersebut, karena pada saat itu Palestina secara *de jure* berada di bawah kekuasaan Inggris.¹¹ Penyerahan wilayah Palestina dan sejumlah kawasan sekitarnya, oleh Inggris kepada Zionis-Yahudi merupakan bagian dari kesepakatan sebagai imbalan atas

⁹ David Fromkin, *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, (New York: Owl Books, 2001), 119.

¹⁰ Howard M. Sachar, *The Emergence of Middle East 1914-1924*, (London: Allen Lane The Penguin Press, 1970), 122-138.

¹¹ Muhsin Muhammad Shaleh, *Dirasah Manhajiyyah fi Al-Qadhiyyah Al-Filisthiniyyah*, (Kuala Lumpur: Fajar Ulung, 2002), 34.

dukungan gerakan Zionis internasional terhadap Inggris dalam Perang Dunia I.¹²

Sejak tahun 1917 terjadi sebuah kesepakatan yang dianggap tidak lazim antara pemerintah Inggris dan komunitas Yahudi. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, secara resmi menjanjikan pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina, sebuah wilayah yang secara historis tidak pernah ditaklukkan maupun dihuni secara signifikan oleh bangsa Yahudi. Keputusan ini dipandang sebagai awal mula ketidakadilan di Palestina.¹³

Jatuhnya Palestina ke tangan Inggris menandai awal dari proses keruntuhan Kekhilafahan Utsmani yang bermarks di Istanbul. Awalnya, kelompok Turki Muda berhasil melemahkan posisi Khalifah dengan membatasi perannya sebatas simbol keagamaan, hingga akhirnya pada Maret 1924 institusi kekhilafahan secara resmi dihapus dan digantikan oleh Negara Turki sekuler. Banyak analisis menyebut bahwa keruntuhan ini lebih disebabkan oleh melemahnya otoritas Khilafah dari dalam, terutama akibat pengaruh kuat gerakan Turki Muda yang bersekutu

¹² Tiar Anwar Bachtiar, *Jas Mewah....*, 170.

¹³ Muhsin Muhammad Shaleh, *Dirasah Manhajiyyah....*, 34.

dengan Inggris dan kelompok Zionis Yahudi, dibandingkan sekedar karena kekalahan militer dalam Perang Dunia I.¹⁴

Keruntuhan Kekhilafahan Turki Utsmani berdampak langsung terhadap semakin memburuknya kondisi Palestina. Inggris, setelah menguasai wilayah tersebut, memisahkannya dari wilayah Suriah berdasarkan kesepakatan rahasia dengan Prancis dalam Perjanjian *Sykes-Picot* tahun 1916.¹⁵ Setelah Inggris menguasai kawasan Palestina, termasuk Baitul Maqdis, mereka menyerahkan kepemimpinan wilayah tersebut kepada seorang tokoh Yahudi, Herbert Samuel, yang menjabat sebagai Komisaris Tinggi antara tahun 1920 hingga 1925. Sejak saat itu hingga berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, para penguasa yang ditunjuk oleh Inggris di wilayah Palestina secara umum dianggap menjalankan kebijakan yang mendukung proyek pendirian negara Yahudi dan mendorong marginalisasi serta pengusiran penduduk Arab-Palestina dari tanah mereka sendiri.¹⁶

Runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani serta jatuhnya Palestina yang didalamnya terdapat salah satu warisan agung umat Islam, yakni Masjid al-Aqsha di Baitul Maqdis, menjadi perhatian serius bagi umat Islam, tidak hanya di kawasan Timur Tengah,

¹⁴ Eugene Rogan, *The Fall of the Khilafah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2018), 467.

¹⁵ Muhsin Muhammad Shaleh, *Dirasah Manhajiyyah...*, 50.

¹⁶ Muhsin Muhammad Shaleh, *Dirasah Manhajiyyah...*, 35.

tetapi juga di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Dalam konteks tersebut, umat Islam Indonesia, meskipun masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina. Umat Islam di Indonesia pada masa itu tengah berada dalam fase akhir penjajahan oleh bangsa Eropa, khususnya Belanda yang telah lama mencengkeram kekuasaannya di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim ini. Oleh karena itu, kondisi umat Islam Indonesia kurang lebih serupa dengan umat Islam di Palestina, sama-sama berada di bawah kekuasaan kolonial. Namun, kesamaan nasib ini tidak membuat umat Islam Indonesia kehilangan sensitivitas dan kepedulian terhadap penderitaan sesama Muslim di belahan dunia lain.¹⁷ Sikap tersebut tidak terlepas dari kuatnya ikatan keagamaan (ukhuwah Islamiyah), semangat Pan-Islamisme, dan kesadaran antikolonial yang tumbuh pesat di kalangan umat Islam Indonesia sejak awal abad ke-20.¹⁸

Pan-Islamisme merupakan gagasan, gerakan, dan kebijakan politik yang bertujuan menyatukan umat Islam, baik di dalam maupun di luar wilayah Turki Utsmani, di bawah kepemimpinan khalifah Turki Utsmani. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap intervensi dan kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-

¹⁷ Tiar Anwar Bachtiar, *Jas Mewah...*, 172.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002), 181.

negara besar Eropa di dunia Islam.¹⁹ Pada abad ke-19, kekuatan Turki Utsmani yang selama berabad-abad berperan sebagai negara adidaya dan pelindung wilayah-wilayah Islam mulai mengalami kemunduran. Kemunduran ini mencapai puncaknya setelah kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Kekhilafahan Islam terakhir. Situasi inilah yang mendorong munculnya seruan persatuan umat Islam sedunia dari sejumlah pemimpin dan aktivis Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, serta Syaikh Waliyullah al-Dahlawi.²⁰

Organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) menjadi wadah penting dalam menyuarakan sikap pembelaan terhadap Palestina. Surat kabar, majalah, dan pidato-pidato para ulama dan tokoh pergerakan Islam menjadi media utama dalam menyebarkan wacana solidaritas tersebut.²¹ Dalam berbagai forum, umat Islam Indonesia mengecam pendudukan Yahudi dan

¹⁹ Gabor Agoston dan Bruce Masters, *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, (New York: Facts on File, 2009), 453.

²⁰ Tiar Anwar Bachtiar, *Jas Mewah...*, 172-173.

²¹ Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State*, (Leiden: Brill, 2001), 77.

menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, baik melalui seruan moral, penggalangan dana, maupun doa bersama.²²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia telah memiliki kesadaran global yang tinggi dalam menanggapi persoalan keumatan yang terjadi di luar negeri, terutama yang menyangkut wilayah suci umat Islam seperti Palestina. Ini juga menjadi cermin bahwa perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya bersifat lokal dalam menentang kolonialisme Belanda, tetapi juga memiliki dimensi internasional sebagai bagian dari gerakan solidaritas Islam global.

Namun demikian, studi mengenai respons umat Islam Indonesia terhadap isu Palestina pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia masih tergolong minim dan kurang mendapat perhatian yang memadai dalam literatur historiografi. Penelitian-penelitian yang ada lebih banyak membahas konflik Arab-Israel pasca-1948, sedangkan dinamika pada masa Mandat Inggris atas Palestina dan keterlibatan umat Islam Indonesia dalam meresponsnya belum banyak digali secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna merekonstruksi sikap umat Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina antara tahun 1917 hingga 1948, baik dari segi

²² Mohammad Natsir, *Masalah Palestina*, (Jakarta: Hudaya, 1970), 69-

pemikiran, aksi solidaritas, maupun ekspresi politik dan religiusnya. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pengayaan historiografi Islam Indonesia dan membuktikan bahwa umat Islam Indonesia telah memainkan peran aktif dalam membela Palestina jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, masalah pokok yang akan diteliti adalah bagaimana awal terjadinya pendudukan Yahudi di Palestina dan respons aktivis Islam Indonesia yang mewakili beberapa Ormas Islam pada tahun 1917-1948. Dari masalah pokok tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana awal pendudukan Yahudi di Palestina?
2. Bagaimana Pan-Islamisme menjadi penghubung solidaritas aktivis Islam Indonesia terhadap isu Palestina?
3. Bagaimana respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada 1917-1948?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami awal pendudukan Yahudi di Palestina dan respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan ini pada tahun 1917-1948 yang

sepengetahuan penulis belum banyak yang mengkajinya secara khusus. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah terungkapnya hal-hal sebagai berikut:

1. Awal pendudukan Yahudi di Palestina.
2. Pan-Islamisme menjadi penghubung solidaritas aktivis Islam Indonesia terhadap isu Palestina.
3. Respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada 1917-1948.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperjelas awal pendudukan Yahudi di Palestina, dampak dari deklarasi Balfour dan Mandat Inggris terhadap Palestina, Pan-Islamisme yang menjadi jembatan perhatian para aktivis Islam di Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan memperjelas respons para aktivis Islam di Indonesia yang mewakili beberapa Ormas Islam dari kalangan modernis dan tradisional terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada tahun 1917-1948.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada tahun 1917–1948 memiliki manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sejarah,

khususnya dalam bidang sejarah politik Islam. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai respons aktivis Islam Indonesia terhadap isu-isu internasional, terutama yang berkaitan dengan penindasan dan kolonialisme yang menimpa sesama umat Islam di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, Palestina menjadi contoh nyata dari bentuk penjajahan yang berlapis: pertama oleh Inggris sebagai mandatur, dan kedua oleh Zionis Yahudi sebagai pemukim penjajah. Berdasarkan pengamatan penulis, topik ini masih jarang mendapat perhatian mendalam dari para sejarawan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan historis kepada berbagai kalangan yang memerlukan, khususnya terkait keterlibatan umat Islam Indonesia dalam isu Palestina pada masa pra-kemerdekaan.
2. Menjadi rujukan dalam memahami respons umat Islam Indonesia, yang diwakili oleh para aktivis dari berbagai organisasi masyarakat Islam terhadap pendudukan Yahudi di Palestina sebelum kemerdekaan Indonesia. Sikap ini menjadi salah satu dasar yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia pasca-kemerdekaan dalam menyikapi isu Palestina, yaitu dengan secara konsisten menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk penolakan terhadap

keberadaan negara penjajah yang telah merampas hak-hak bangsa Palestina.

3. Memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan literatur sejarah mengenai solidaritas Indonesia terhadap Palestina, baik pada masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan, sehingga memperkuat narasi historis hubungan kedua bangsa dalam lintasan perjuangan dan kemanusiaan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dan kajian mengenai pendudukan Yahudi di Palestina telah banyak dilakukan. Namun, studi yang secara khusus membahas respons aktivis Islam di Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina 1917-1948 masih sangat terbatas dan belum banyak diteliti secara mendalam. Untuk menggali permasalahan tersebut, penulis merujuk pada sejumlah sumber yang dijadikan sebagai acuan penelitian, baik dalam bentuk buku maupun disertasi dan tesis. Misalnya: Disertasi dengan judul *“Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Diplomasi Pemerintahan Era Reformasi 1998-2018 Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina)”*. Ditulis oleh Masyrofah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Disertasi ini membahas mengenai konflik Israel-Palestina dalam teori hubungan Internasional, Politik Islam dan *Siyasah Kharijiyyah* berdasarkan kaidah bahwa pada dasarnya hubungan antarnegara adalah perdamaian. Indonesia dapat berperan aktif dalam

mengupayakan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina melalui diplomasi baik oleh pemerintah, nonpemerintah dan bahkan sampai akar rumput (*grass root*). Disertasi ini mengelaborasi kepemimpinan kelima kepala negara pada era reformasi yang sepakat mendukung penuh perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya, namun masing-masing memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda dalam menyikapi isu Palestina, baik dalam pola maupun metode diplomasi. Kemudian Indonesia juga negara yang aktif memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk program *Capacity Building* untuk mempersiapkan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Ada empat faktor yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina, yaitu faktor historis, faktor teologis, faktor politis dan faktor humanis. Melalui penelitian ini, Masyrofah telah mengintegrasikan tiga bidang keilmuan yaitu Politik Islam (*Siyasah*), Hubungan Internasional dan Komunikasi Internasional dengan melahirkan konsep politik luar negeri bebas aktif yang pro perdamaian. Namun, dalam disertasi ini tidak dibahas mengenai sikap dan respons para aktivis Islam yang menjadi *founding fathers* bangsa ini sebelum kemerdekaan. Padahal, kebijakan luar negeri Indonesia terkait masalah Palestina setelah kemerdekaan hingga saat ini sangat dipengaruhi oleh sikap dan respons para aktivis Islam terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada masa prakemerdekaan.

Meskipun demikian, disertasi tersebut sangat membantu penulis dalam meneliti kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Palestina, yang hingga kini tetap menunjukkan semangat konsistensi sebagaimana ditunjukkan sejak awal kemerdekaan. Republik Indonesia secara resmi menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk penolakan terhadap pengakuan eksistensi negara tersebut, yang dianggap sebagai entitas penjajah ilegal yang telah merampas hak-hak rakyat Palestina. Sikap tegas para aktivis Islam Indonesia sebelum kemerdekaan inilah yang memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa awal berdirinya Republik, khususnya dalam membela dan mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Selanjutnya adalah tesis dengan judul “*Konspirasi Freemasonry dalam Kerajaan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909)*”. Ditulis oleh Deden Anjar Herdiansyah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Tesis ini membahas runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani dan dampak besar yang ditimbulkannya terhadap kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Keruntuhan Turki Utsmani menyebabkan kekosongan kepemimpinan politik dalam dunia Islam yang berlangsung sangat lama dan masih dirasakan hingga saat ini serta turut mengubah secara drastis peta politik di kawasan Timur Tengah. Sebagai kekuatan yang sebelumnya mendominasi wilayah tersebut, Turki Utsmani harus kehilangan sebagian besar daerah

kekuasaannya, termasuk wilayah Palestina. Kondisi inilah yang membuka jalan bagi gerakan Zionisme internasional untuk dengan mudah menduduki Palestina. Sekalipun di dalamnya tidak ada bahasan tentang respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina, tesis ini memberikan informasi tentang Pan-Islamisme sebagai gagasan tentang persatuan umat Islam sedunia yang diserukan banyak pemimpin dan aktivis Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Syaikh Waliyullah al-Dahlawi, dan lainnya. Gagasan ini muncul setelah kolonialisme terhadap negeri-negeri Islam di Asia dan Afrika oleh negara-negara Eropa semakin kuat. Dalam konteks sejarah, Pan-Islamisme bertransformasi dari ide *universal* ke dalam praksis lokal yang disesuaikan dengan situasi kolonialisme di berbagai negeri Islam, termasuk Indonesia. Sikap ini menjadi dasar penting yang akan membentuk persepsi para aktivis Islam di Indonesia ini terhadap masalah Palestina. Artinya, sikap terhadap Palestina merupakan konsekuensi lanjutan dari sikap dasar aktivis Islam di Indonesia terhadap masalah dunia Islam secara umum. Kendati perbedaan konsep Pan-Islamisme yang digagas oleh Sultan Abdul Hamid II dan Jamaluddin al-Afghani tidak dibahas secara mendalam, uraian mengenai Pan-Islamisme dalam tesis ini sangat membantu penulis dalam memetakan semangat Pan-Islamisme sebagai jembatan solidaritas aktivis Islam Indonesia terhadap isu Palestina.

Selanjutnya adalah artikel yang diterbitkan oleh jurnal MIQOT Volume XXXIX, Nomor 2 Juli-Desember 2015 yang berjudul *“Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan.”* Ditulis oleh Misri A. Muchsin. Isi dari artikel jurnal ini membahas tentang perlawanan umat Islam Palestina terhadap pendudukan Yahudi-Israel. Berdasarkan hasil kajian penulis, ditemukan bahwa keberhasilan Zionis-Israel dalam menduduki wilayah Palestina tidak terlepas dari dukungan kuat sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, perjuangan Palestina berlangsung hampir tanpa dukungan yang memadai, karena negara-negara Islam di sekitarnya, yang sebelumnya sempat berupaya memberikan bantuan, terutama pada tahun 1968 mengalami kekalahan dalam Perang Enam Hari. Akibat kekalahan tersebut, Mesir, Suriah, Yordania, dan Palestina kehilangan sebagian wilayahnya kepada Israel. Dalam artikel ini penjelasan tentang akar dari pendudukan Yahudi di Palestina pada periode mandat Inggris 1917-1948 tidak dibahas secara mendalam, hanya sekilas saja, padahal memahami akar dari pendudukan ini sangat penting.

Artikel lainnya adalah yang diterbitkan oleh jurnal CMES Volume XI Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, program studi sastra Arab FIB UNS Surakarta yang berjudul *“Deklarasi Balfour: Tragedi Bagi Bangsa Palestina dalam Puisi-Puisi Arab Tahun 1920-1948.”* Ditulis oleh Hindun, mahasiswi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Isi dari artikel jurnal ini adalah tentang puisi-

puisi karya para penyair Arab yang membicarakan dan mempertanyakan Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour yang dicanangkan pada tahun 1917 telah berhasil dengan gemilang menciptakan negara khusus bagi Yahudi, yaitu negara Israel dan di waktu yang bersamaan juga telah berhasil memusnahkan suatu bangsa, yaitu bangsa Palestina. Inggris bersama Amerika telah menyebabkan hilangnya hak bangsa Palestina atas buminya, yaitu bumi Palestina. Hindun menyampaikan bahwasanya kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina sejak tahun 1882 telah mengubah tatanan kehidupan rakyat Palestina. Orang-orang Yahudi mulai membeli tanah dari warga Palestina dengan tujuan untuk menguasai seluruh wilayah Palestina di masa depan. Penguasaan ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita mendirikan negara Yahudi yang telah diproklamasikan oleh Organisasi Zionis Dunia. Penguasaan atas tanah Palestina semakin nyata ketika Pemerintah Utsmani di Palestina dikalahkan dan wilayah tersebut jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1917, Inggris memberi jalan bagi Organisasi Zionis dengan menandatangani Deklarasi Balfour yang memberikan izin kepada mereka untuk menjadikan Palestina sebagai tanah air bagi orang Yahudi. Dalam kurun waktu tiga dekade, Organisasi Zionis berhasil mencaplok Palestina dan menjadikannya negara Yahudi yang bernama Israel. Pendirian negara Israel menjadi sebuah tragedi bagi rakyat Palestina. Para penyair Arab telah melakukan perlawanan sejak penandatanganan Deklarasi Balfour hingga terjadinya tragedi pencaplokan Palestina

oleh Israel, melalui puisi-puisi mereka. Karya sastra, dalam teori *adab al-muqawamah* (sastra perlawanan), ditulis untuk membangkitkan semangat perjuangan suatu bangsa dalam melawan kolonialisme. Para penyair Arab melalui puisi-puisi mereka memperingatkan tentang dampak buruk dari Deklarasi Balfour bagi Palestina. Puisi-puisi mereka juga bertujuan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Artikel ini sangat membantu penulis dalam memahami perlawanan yang dilakukan oleh para penyair lewat puisi-puisi mereka pada periode Palestina dibawah pemerintahan mandat Inggris sampai berdirinya negara Isarel tahun 1948.

Artikel lainnya adalah yang diterbitkan oleh jurnal HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah (Jurnal UPI). Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2024, halaman 159-172 yang berjudul "*Narasi Keberpihakan: Kajian Sejarah Komitmen Nahdlatul Ulama Terhadap Isu Palestina dari Era Kolonial Hingga Kontemporer.*" Ditulis oleh Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni, Muhammad Luthfi Zuhdi, Yon Machmudi, dan Muhamad Syauqillah dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia. Isi dari artikel ini membahas Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi dengan basis massa yang kuat, telah menunjukkan dukungan berkelanjutan kepada rakyat Palestina. NU berperan penting dalam menyuarakan perjuangan Palestina melalui berbagai platform, seperti seminar, deklarasi, dan program-program kemanusiaan. Narasi yang dibangun

mencerminkan komitmen jangka panjang NU terhadap keadilan dan hak asasi manusia, meskipun dalam pelaksanaannya kadang menghadapi sejumlah kendala. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan NU bukan sekadar simbolis, melainkan terintegrasi dalam komitmen kolektif yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran publik mengenai isu ini. Artikel ini juga membahas sikap Nahdlatul Ulama (NU) terhadap pendudukan Yahudi atas Palestina pada masa kolonial. Meskipun ulasan mengenai periode tersebut tidak terlalu mendalam dan lebih banyak difokuskan pada era kontemporer, tulisan ini tetap memberikan kontribusi berarti bagi penulis dalam memetakan respons NU dan sejumlah tokohnya terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada masa kolonial

Selain disertasi, tesis dan artikel, penulis juga meneliti buku yang ditulis oleh K.H. Saifuddin Zuhri yang berjudul *“Palestina dari Masa ke Masa”*. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bagian Penerbitan-Penyiaran, bulan Desember tahun 1947. Bersampul cokelat, salah satunya yang dikoleksi Perpustakaan Masjid Syuhada’ Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku ini diterbitkan kembali oleh Komunitas Pegon Banyuwangi, bulan November 2023. K.H. Saifuddin Zuhri, merupakan tokoh NU yang lahir di kota kawedanan Sokaraja, 9 kilometer dari Banyumas, 1 Oktober 1919. Beliau meninggal 25 Maret 1986 pada umur 66 tahun. Pada usia 35 tahun K.H. Saifuddin Zuhri menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU) merangkap Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat dan anggota Parlemen Sementara. Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada usia 39 tahun, lalu mengangkatnya menjadi Menteri Agama ketika berusia 43 tahun.

Dalam bukunya ini, Kiai Saifuddin menguraikan sejarah panjang Palestina yang telah terbentang jauh sejak 13 Abad lamanya. Dimulai dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian masa perang Salib, hingga pada akhir perang dunia pertama. Dimana Turki yang menguasai Palestina takluk kepada Inggris dan menyerahkannya ke negara Ratu Elizabeth tersebut. Di bawah kekuasaan Inggris itulah, Palestina mulai dihuni oleh sekelompok orang Yahudi yang tergabung dalam gerakan Zionisme. Dalam sebuah pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Sir Arthur James Balfour pada 2 Nopember 1917, dimulailah praktik Zionisme di Palestina. Sebuah negara nasional Yahudi (*Jewish National State*) dinyatakan berdiri. Dikemudian hari, pengumuman tersebut, dikenal sebagai *Balfour Declaration*. Dalam buku ini juga ditulis respons bangsa Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina. Seperti halnya respon NU dengan pekan rajabiyah-nya. Dimana NU mengutuk keras penguasaan Palestina oleh Zionis Yahudi. Buku ini sangat membantu penulis dalam meneliti respons tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terhadap pendudukan Yahudi di Palestina, baik pada

masa sebelum kemerdekaan maupun pada periode awal kemerdekaan Indonesia.

Buku selanjutnya adalah yang ditulis oleh Mohammad Natsir yang berjudul "*Masalah Palestina*". Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Hudaya Jakarta, bulan September tahun 1970. Mohammad Natsir, atau M. Natsir (1908-1993), merupakan tokoh nasional yang dikenal sebagai birokrat, politisi, sekaligus pendakwah. Pada tahun 1938, ia mulai aktif dalam dunia politik dengan bergabung ke dalam Partai Islam Indonesia (PII), dan pada tahun 1940–1942 menjabat sebagai Ketua PII cabang Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, Natsir turut aktif dalam organisasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang didirikan pada 5 September 1942. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Dalam Masyumi, Natsir berperan penting sebagai ketua partai dan dikenal luas atas kegigihannya dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui lembaga Konstituante. Selain aktif di Masyumi, Mohammad Natsir juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Kotamadya Bandung pada periode 1942-1945. Kiprahnya sebagai politikus dan negarawan semakin menonjol pada masa awal kemerdekaan. Pada 25 November 1945, ia diangkat sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tidak sampai dua bulan kemudian, tepatnya pada 3 Januari 1946, Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan pertama Republik Indonesia dan menjabat hingga tahun 1949. Pada tahun 1950, ia mengajukan

Mosi Integral Natsir yang berhasil menyatukan kembali Republik Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan, setelah sebelumnya berbentuk federal. Atas keberhasilan tersebut, Presiden Soekarno menunjuk Natsir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia untuk masa jabatan 1950-1951. Mohammad Natsir juga dikenal sebagai seorang ulama yang gigih memperjuangkan hak-hak bangsa melalui pemikiran-pemikirannya. Dalam bukunya ini, Natsir memaparkan pandangannya mengenai isu Palestina. Sebagian isi buku tersebut merupakan naskah pidato yang ia sampaikan pada Kongres Pertama Organisasi Islam Afrika-Asia yang diselenggarakan di Bandung pada 6-11 Oktober 1970. Dalam pidatonya, Natsir menguraikan berbagai aspek penting terkait permasalahan Palestina, antara lain awal mula pendudukan Yahudi di Palestina, peperangan yang terjadi, sejarah gerakan Zionis, posisi Palestina sebagai persoalan umat Islam, hakikat konflik yang berlangsung, kondisi negara-negara di sekitar Palestina, serta harapan terhadap masa depan Palestina. Buku ini sangat membantu penulis dalam meneliti respons tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) terhadap pendudukan Yahudi di Palestina, baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun pada periode awal kemerdekaan Indonesia.

Buku selanjutnya adalah yang ditulis oleh Tashadi, yang berjudul *"Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir: Riwayat Hidup dan Perjuangan"*. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai

Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, bulan Oktober tahun 1986. Buku ini berisi tentang biografi Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir yang merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional. buku ini dengan detail menjelaskan biografi dan nasabnya yang tersambung dengan Kyai Hasan Basari, Panglima Islam pada masa Pangeran Diponegoro. Tidak hanya itu, jaringan intelektual yang dibangun mulai dari pesantren di berbagai tanah Jawa hingga ke tanah suci Makkah menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam kemajuan intelektual di Indonesia dan juga hubungan internasional. Informasi yang sangat membantu penulis dalam penelitian ini adalah ketika Mukhtar Islam Sedunia diselenggarakan di Palestina pada tahun 1931, beliau hadir sebagai peserta termuda yang mewakili Indonesia dan dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris kongres. Adapun yang memimpin jalannya kongres tersebut adalah Syaikh Amin al-Husaini. Perjumpaan tersebut sangat berkesan, karena selain membahas perjuangan rakyat Palestina, juga disuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini terus bergema dalam berbagai forum internasional yang diselenggarakan setelahnya. Kongres Islam yang diselenggarakan di Palestina pada tahun 1931 merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajahan. Jika sebelumnya H.O.S. Tjokroaminoto dan K.H. Mas Mansur telah mewakili umat Islam Indonesia dalam konferensi yang

diselenggarakan oleh Raja Abdul Aziz Ibnu Saud pada tahun 1926, maka pemuda Abdul Kahar Muzakkir, atas inisiatifnya sendiri, menghubungi Partai Syarikat Islam Indonesia dan berhasil mewakili Indonesia dalam Mukhtamar Islam di Palestina tersebut.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Deliar Noer yang berjudul "*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*". Buku ini diterbitkan oleh LP3ES, tahun 1982 yang berasal dari terjemahan disertasi Deliar Noer untuk program doktor di Universitas Cornell di Ithaca, New York Amerika Serikat yang berjudul "*The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*" diterbitkan oleh Oxford University Press, tahun 1973. Buku ini merupakan hasil kajian mendalam mengenai kemunculan, perkembangan, dan dinamika gerakan Islam modern di Indonesia pada periode awal abad ke-20, khususnya antara tahun 1900 hingga 1942, yaitu menjelang kedatangan Jepang dan berakhirnya masa kolonial Hindia Belanda. Deliar Noer membahas bagaimana umat Islam Indonesia mulai merespons perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dibawa oleh kolonialisme Belanda, serta pengaruh global dari dunia Islam, terutama dari Timur Tengah. Deliar Noer melalui buku ini berhasil merekam dinamika kompleks gerakan Islam di Indonesia antara tahun 1900 hingga 1942. Ia menunjukkan bahwa kebangkitan Islam modernis bukan sekadar reaksi terhadap penjajahan, tetapi juga bagian dari proses transformasi sosial dan keagamaan yang panjang. Buku ini sangat membantu penulis dalam penelitian ini untuk memahami akar

gerakan Islam modern di Indonesia, sekaligus untuk menelusuri benang merah perkembangan Islam hingga masa kemerdekaan.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Muhsin Muhammad Shaleh, yang berjudul *“Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi”*. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Gema Insani Press Jakarta, tahun 2002. Buku ini terjemahan dari buku aslinya yang berbahasa Inggris, yang berjudul *“The Palestinian Issue: Its Backround and Development Up To 2000”*. Penulis buku ini adalah seorang sejarawan asli Palestina yang tinggal di Yordania. Buku ini berusaha membuka mata dunia, khususnya kaum muslimin, bahwa klaim kaum Yahudi terhadap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan adalah klaim yang tidak berdasar dan keliru. Melalui data-data sejarah yang disajikan, buku ini mengajak kaum muslimin untuk menyadari bahwa Palestina adalah tanah suci yang harus dimuliakan, dipertahankan, dan diperjuangkan keberadaannya, berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur’an, Sunnah, serta catatan sejarah yang autentik.

Selanjutnya buku yang berjudul *“Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru”*. Buku ini berisi kumpulan makalah seminar “Pekan Persahabatan Indonesia-Palestina” yang diselenggarakan oleh BKK-KUA, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 13-18 Januari 1992. Seminar ini berupaya mengungkap berbagai aspek perjuangan bangsa Palestina. Keistimewaan buku ini terletak pada pembukaannya yang menghadirkan teks pidato Presiden Republik Indonesia ke-2, H.

Soeharto, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dakar, Senegal, pada Desember 1991. Dalam pidato tersebut, secara tegas dinyatakan komitmen bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Selain pidato Presiden Soeharto, buku ini juga dilengkapi dengan pernyataan sejumlah pemimpin negara lain serta wawancara dengan berbagai pakar. Hal ini menjadikan buku ini kaya akan perspektif dan mewakili berbagai visi serta spektrum pandangan, baik mengenai permasalahan Palestina secara khusus maupun dalam konteks dinamika politik kawasan Timur Tengah dan dunia secara umum. Buku ini dieditori oleh M. Riza Sihbudi dan Achmad Hadi, dan diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Jakarta, pada April 1992. Buku ini memberikan kontribusi penting bagi penulis dalam memetakan sikap dan respons tokoh-tokoh Indonesia terhadap isu Palestina, yang sejak awal kemerdekaan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, meskipun tidak mengulas secara khusus respons aktivis Islam terhadap isu tersebut sebelum kemerdekaan

Selanjutnya buku yang berjudul *“Jas Mewah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah dan Dakwah.”* Buku ini ditulis oleh Tiar Anwar Bachtiar, seorang doktor lulusan Departemen Sejarah Universitas Indonesia, dan diterbitkan oleh Pro-U Media, Yogyakarta, pada tahun 2018. Salah satu tema dalam buku ini yang menarik perhatian penulis dalam penyusunan penelitian ini terdapat pada halaman 170-183, dengan judul *“Sikap Aktivis Islam di Indonesia terhadap Pendudukan Yahudi di Baitul Maqdis Tahun*

1917–1948”. Meskipun tema ini tidak dilengkapi dengan landasan teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami secara mendalam bagaimana munculnya sikap para aktivis Islam di Indonesia terhadap isu Palestina, namun pembahasan dalam tulisan tersebut sangat membantu penulis dalam memetakan fokus permasalahan penelitian. Bahkan, tulisan inilah yang mendorong ketertarikan penulis untuk mendalaminya lebih lanjut dan merumuskannya dalam bentuk tesis ini

F. Landasan Teori

Dalam penelitian sejarah, penggunaan landasan teori dan pisau analisis menjadi penting untuk memberikan kerangka interpretatif terhadap data dan sumber yang diteliti. Tema mengenai *Respons Aktivis Islam Indonesia terhadap Pendudukan Yahudi di Palestina 1917–1948* menuntut pemahaman yang tidak hanya historis, tetapi juga teoritis, terutama terkait dinamika politik internasional, keagamaan, dan ideologi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori respons dan teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Anthony Oberschall sebagai pisau analisis utama.

Anthony Oberschall (1936-2023) adalah seorang sosiolog terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang gerakan sosial, konflik, dan perubahan politik. Ia lahir di Hungaria dan pindah ke Amerika Serikat, di mana ia melanjutkan pendidikan tingginya dan memperoleh gelar Ph.D. dari Columbia University.

Oberschall kemudian menjadi profesor di berbagai universitas ternama, termasuk University of California, Los Angeles (UCLA), sebelum akhirnya mengabdikan sebagai profesor emeritus di University of North Carolina, Chapel Hill. Karya-karyanya banyak membahas dinamika konflik sosial, gerakan massa, kekerasan kolektif, serta mobilisasi politik. Oberschall juga memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor sosial yang mendorong lahirnya gerakan perlawanan, revolusi, hingga konflik etnis dan politik.

Beberapa karyanya yang terkenal antara lain: *Social Conflict and Social Movements* (1973), *Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to Ethnic Violence* (2007), dan *Social Movements: Ideologies, Interests, and Identities*. Teori konflik sosial Oberschall menekankan bahwa konflik bukan hanya hasil dari perbedaan individu, tetapi merupakan produk dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kelompok dalam masyarakat. Konflik muncul ketika terdapat kesenjangan kepentingan, ketidakadilan, atau penindasan yang dirasakan, yang kemudian memicu mobilisasi kolektif untuk mengubah keadaan.

Pokok-pokok pemikiran teori konflik sosial Oberschall: Pertama, Mobilisasi Sosial. Konflik sosial sering lahir karena adanya mobilisasi kelompok atau massa yang merasa dirugikan atau tertindas. Mobilisasi ini memerlukan organisasi, ideologi,

serta jaringan komunikasi yang efektif. Kedua, Struktur Peluang Politik (Political Opportunity Structure). Konflik meningkat ketika kondisi politik membuka peluang bagi kelompok untuk mengekspresikan tuntutan, misalnya melalui kelemahan negara atau ketidakstabilan pemerintah. Ketiga, Keterlibatan Identitas Kolektif. Oberschall menekankan bahwa identitas kelompok (misalnya etnis, agama, atau kelas sosial) menjadi bahan bakar penting dalam memunculkan konflik. Keempat, Proses Negosiasi dan Resolusi. Ia juga mengkaji bagaimana konflik dapat dikelola melalui negosiasi, mediasi, dan transformasi sosial.²³ Dalam bukunya *Conflict and Peace Building in Divided Societies*, Oberschall membahas bagaimana rekonsiliasi dapat terjadi di tengah konflik etnis yang panjang.²⁴

Pada paruh kedua abad ke-19, tantangan yang dihadapi umat Islam tidak lagi terbatas pada ketertinggalan dalam bidang teknologi, tetapi juga meluas kepada dominasi militer Barat yang mulai merangsek masuk ke wilayah-wilayah berpenduduk Muslim. Penaklukan Prancis atas Aljazair, serangan Rusia ke kawasan Kaukasus, Yunan, dan Turkistan, pendudukan penuh Inggris atas India, serta ekspansi Belanda di Sumatera dan pulau-pulau lain di Hindia Timur telah mendorong umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan pendorong (*energy force*)

²³ Anthony Oberschall, *Social Conflict and Social Movements*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1973), 21-28.

²⁴ Anthony Oberschall, *Conflict and Peace Building in Divided Societies: Respons to Ethnic Violence*, (London: Routledge, 2007), 49-51.

dalam perjuangan anti-kolonialisme.²⁵ Kondisi inilah yang melatarbelakangi Sultan Abdul Hamid II menggelorakan Pan-Islamisme. Ada sosok berpengaruh lainnya yang tidak bisa dilewatkan dalam diskursus ini, yaitu Jamaluddin al-Afghani (1838-1897). Dia adalah tokoh yang getol mempromosikan “Pan-Islamisme Modern” sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme Barat.²⁶ Al-Afghani jauh lebih populer setelah kematiannya dibanding ketika dia masih hidup, berkat usaha murid-muridnya yang menuliskan biografi dan pemikirannya dalam bentuk memoar, buku, dan artikel.²⁷

Pan-Islamisme adalah ideologi yang menyerukan solidaritas dan persatuan seluruh umat Islam di dunia, melampaui batas-batas teritorial dan etnis, di bawah satu kepemimpinan atau semangat ukhuwah Islamiyah. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kemunduran dunia Islam akibat kolonialisme Barat, dan mendapat tempat yang kuat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20,

²⁵ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, (Jakarta: Panitia Penerbit Dunia Baru Islam, 1966), 50.

²⁶ Menurut Stoddard, Pan-Islamisme memiliki dua bentuk utama. Pertama, Pan-Islamisme yang bercorak sufistik dan berlandaskan gerakan tarekat, seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II selaku Khalifah Utsmaniyah yang mendukung para sufi sebagai agen penyebaran Pan-Islamisme. Contoh lainnya adalah peran Tarekat Sanusiyyah di Libya dalam melawan pendudukan Prancis. Kedua, adalah Pan-Islamisme modern yang dijalankan oleh kalangan pemikir, dengan Jamaluddin al-Afghani sebagai tokoh pelopornya.. Lihat Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam...*, 52.

²⁷ Jacob M. Landau, *The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization*, (Oxford: Clarendon Press, 1990), 13.

terutama pasca-runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani.²⁸ Gerakan Pan-Islamisme inilah yang menjadi penggerak utama dalam menyatukan umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Hindia Belanda, dalam merespons krisis Palestina dan pendudukan Zionis-Yahudi. Aktivis Islam di Indonesia pada periode 1917-1948 menunjukkan reaksi yang kuat terhadap penderitaan rakyat Palestina sebagai bagian dari kesadaran Pan-Islamisme, baik melalui organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), maupun melalui media cetak dan aksi solidaritas.

Menurut Albert Hourani, Pan-Islamisme pada awalnya merupakan suatu usaha moral dan intelektual untuk menghidupkan kembali persatuan Islam sebagai reaksi terhadap tekanan Barat dan kolonialisme.²⁹ Pan-Islamisme juga menjadi media perlawanan ideologis umat Islam terhadap hegemoni kekuatan asing yang merusak nilai-nilai dan wilayah umat.³⁰

Teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Anthony Oberschall tidak hanya menekankan perbedaan kepentingan sebagai sumber konflik, tetapi juga melihat pentingnya organisasi,

²⁸ Gabor Agoston and Bruce Masters, *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, (New York: Facts On File, Inc. An imprint of Infobase Publishing, 2009), 453.

²⁹ Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 103.

³⁰ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2005), 84-85.

persepsi bersama, dan dinamika interaksi antarkelompok dalam menciptakan aksi sosial. Penerapan teori konflik sosial ini digunakan untuk menelaah bagaimana konflik antara Yahudi-Zionis dan rakyat Palestina memicu reaksi solidaritas di kalangan umat Islam, termasuk para aktivis Islam Indonesia. Tanggapan para tokoh dan organisasi Islam Indonesia terhadap situasi di Palestina tidak hanya merupakan ekspresi keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika konflik global yang mengandung unsur sosial, politik, dan ideologis.

Teori konflik sosial dari Anthony Oberschall memberikan kerangka yang efektif untuk menganalisis respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina. Pendekatan ini mampu menyingkap dimensi sosial, politik, dan ideologis dari konflik yang melampaui batas negara. Dengan menggunakan teori ini, sikap aktivis Islam Indonesia dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk solidaritas keagamaan, tetapi sebagai bagian dari dinamika konflik sosial global yang menuntut keadilan dan kedaulatan bagi bangsa Palestina.

Penelitian ini juga mempertimbangkan keterkaitan antara Pan-Islamisme dan nasionalisme Islam. Dalam konteks Hindia Belanda, gerakan Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan juga dipengaruhi oleh nasionalisme modern. Namun, dalam isu Palestina, yang dominan adalah semangat keumatan (ummah) yang melampaui batas bangsa. Hal ini menunjukkan

bahwa nasionalisme umat Islam Indonesia tidak bersifat sekuler, melainkan bersenyawa dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Seperti diungkapkan Fazlur Rahman, kebangkitan Islam modern tidak bisa dilepaskan dari upaya mengintegrasikan kembali agama dan politik dalam merespons tantangan kolonialisme dan dominasi asing.³¹ Oleh karena itu, semangat Pan-Islamisme dalam konteks ini tidak bertentangan dengan perjuangan nasional, melainkan menjadi salah satu pendorongnya.

Kasus Palestina antara tahun 1917 hingga 1948 menjadi perhatian besar dunia Islam karena merupakan simbol kezaliman kolonial, pengkhianatan kekuatan Barat melalui Deklarasi Balfour, dan ancaman terhadap situs suci umat Islam, yakni Baitul Maqdis. Aktivis Islam Indonesia memaknai tragedi ini sebagai ancaman terhadap Islam global. Melalui Pan-Islamisme, sikap mereka dapat dibaca sebagai bentuk solidaritas lintas wilayah yang memiliki dasar ideologis dan religius.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi sejarah yang berusaha merekonstruksi secara ilmiah bagaimana respons, sikap dan tanggapan para aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina selama periode 1917 hingga 1948. Metode

³¹ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 246

yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³² Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri fakta masa lalu secara sistematis dan kritis dengan tujuan merekonstruksi peristiwa secara deskriptif-analitis, dalam hal ini mengenai respon dan sikap aktivis Islam Indonesia terhadap persoalan Palestina sejak dimulainya pendudukan Yahudi di bawah perlindungan Inggris. Sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo, pendekatan sejarah berupaya memahami fakta sosial dalam dimensi waktu melalui narasi yang runtut dan argumentatif, bukan sekadar kronik atau catatan peristiwa belaka.³³

Dalam tahapan heuristik, penulis mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data atau dokumen yang berasal langsung dari masa atau pelaku peristiwa yang diteliti, sezaman dengan peristiwa yang dikisahkan. Sumber ini dianggap memiliki otentisitas dan kedekatan langsung terhadap fakta sejarah yang sedang dikaji.³⁴ Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan antara lain; berupa surat kabar dan majalah

³² Gilber J. Garraghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1946), 103-426.

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), 34.

³⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 96.

era pergerakan nasional seperti Bendera Islam, Mustika, Pandji Islam, Al-Lisaan, Berita Nahdlatul Ulama (BNO) dan yang lainnya. Selain itu, pernyataan tokoh seperti Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Saifuddin Zuhri, dan tokoh Islam lainnya juga dikategorikan sebagai sumber primer. Risalah kongres organisasi Islam, misalnya dokumen hasil Kongres Sarekat Islam, Kongres Muhammadiyah, dan Mukhtamar Nahdlatul Ulama, terutama yang menyinggung isu Palestina. Arsip kolonial dan surat kabar berbahasa Belanda, seperti *Het Nieuws Van Den Dag*, *De Indische Courant*, *Het Dagblad*, *Nieuwe Courant*, *Algemeen Indisch Daagblad*, dan yang lainnya yang mengandung informasi tambahan mengenai respon politik terhadap konflik di Timur Tengah, termasuk dari Hindia Belanda. Sumber-sumber primer ini diperoleh dari berbagai lembaga dan pusat dokumentasi seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), perpustakaan PBNU pusat, perpustakaan PP Persis, dan yang lainnya. Juga Delpher, yaitu situs web yang menyediakan teks lengkap surat kabar, buku, jurnal, dan lembar kopi siaran berita radio bersejarah berbahasa Belanda yang didigitalisasi.

Sumber sekunder merupakan hasil interpretasi, ulasan, atau analisis terhadap peristiwa sejarah oleh para peneliti atau

sejarawan yang tidak hidup pada masa peristiwa terjadi.³⁵ Sumber ini penting dalam memberikan kerangka teori, latar belakang, dan penafsiran atas data primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku sejarah Indonesia dan Timur Tengah, khususnya yang membahas pergerakan Islam, kolonialisme, dan isu Palestina. Disertasi dan tesis yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang menyoroti isu pan-Islamisme, solidaritas umat Islam, dan politik internasional abad ke-20.

Dengan pendekatan heuristik yang sistematis ini, peneliti dapat menjamin bahwa data yang dikumpulkan memenuhi syarat keaslian (autentisitas) dan relevansi terhadap pokok permasalahan yang sedang diteliti. Setelah seluruh data berhasil ditemukan, penulis mengelompokkannya ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer (sumber utama yang sezaman dengan peristiwa yang diteliti) dan sumber sekunder (sumber yang berkaitan dan mendukung pembahasan penelitian). Adapun rincian sumber yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Sumber Primer

Dokumen Koran-Koran

1. Pandji Peostaka, No. 81, 1 Oktober 1929.

³⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, 95-98.

2. Het Nieuws Van Den Dag, 6 Maret 1930.
3. Mustika No. 129, 3 Oktober 1931.
4. Het Nieuws Van Den Dag, 2 Juni 1934.
5. De Indische Courant, 24 Maret 1930.
6. De Indische Courant, 11 April 1930.
7. De Indische Courant, 9 Juli 1930.
8. Al-Lisaan, 20 Juli 1937.
9. Berita Nahdlatol 'Oelama, 1 Agustus 1937.
10. Berita Nahdlatol 'Oelama, 15 April 1938.
11. Berita Nahdlatol 'Oelama, 1 September 1938.
12. Berita Priangan, 22 September 1939.
13. Het Dagblad, 16 Mei 1947.
14. Nieuwe Courant, 31 Januari 1948.
15. De Nieuwsgier, 16 Oktober 1948.
16. De Vrij Pers, 30 Desember 1948.
17. Het Nieuws Blad for Sumatra, 24 Mei 1954.
18. Pedoman Masjarakat, 10 Juli 1938.
19. Pedoman Masjarakat, 10 Juli 1936.
20. Pandji Islam, 9 Januari 1939.
21. Pandji Islam, November 1941.
22. Jewish Daily Bulletin, 5 Juli 1927.
23. De Sumatera Post, 5 Maret 1934.
24. Algemeen Indisch Daagblad, 5 Juli 1947.
25. Bandera Islam, 16 Oktober 1924.
26. Bandera Islam, 30 Oktober 1924.

27. Bendera Islam 14 Desember 1924.
28. Bendera Islam, 8 Januari 1925.
29. Neratja, 4 November 1922.
30. Hindia Baroe, 16-18 Oktober 1924
31. Soera Moeslimin Indonesia, No. 18 tahun II, 27 Syawwal 1363.
32. Soeara Moeslimin Indonesia, No. 20 tahun II, 27 Syawwal 1363.

Buku

1. Palestina dari Zaman ke Zaman, karya KH. Saifuddin Zuhri, diterbitkan pertama kali oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bagian Penerbitan-Penyiaran, bulan Desember tahun 1947. Buku ini diterbitkan kembali oleh Komunitas Pegon Banyuwangi, bulan November 2023.

Sumber Sekunder

Buku

1. Masalah Palestina, karya Mohammad Natsir, diterbitkan oleh penerbit Hudaya Jakarta, pada bulan September tahun 1970.
2. Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir: Riwayat Hidup dan Perjuangan, karya Tashadi. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan

Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, bulan Oktober tahun 1986.

3. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, karya Deliar Noer. Buku ini diterbitkan oleh LP3ES, tahun 1982 yang berasal dari terjemahan disertasi Deliar Noer untuk program doktor di Universitas Cornell di Ithaca, New York Amerika Serikat yang berjudul "*The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*" diterbitkan oleh Oxford University Press, tahun 1973.
4. Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi, karya Muhsin Muhammad Shaleh. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Gema Insani Press Jakarta, tahun 2002. Buku ini merupakan terjemahan dari karya aslinya dalam bahasa Inggris yang berjudul *The Palestinian Issue: Its Background and Development Up to 2000*.
5. Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru. Buku ini berisi kumpulan makalah seminar "Pekan Persahabatan Indonesia-Palestina" yang diselenggarakan oleh BKK-KUA, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 13-18 Januari 1992.
6. Jas Mewah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah dan Dakwah. Buku ini ditulis oleh Tiar Anwar Bachtiar, seorang doktor lulusan Departemen Sejarah Universitas Indonesia, dan diterbitkan oleh Pro-U Media, Yogyakarta, pada tahun 2018.

Setelah tahap heuristik atau pengumpulan sumber selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah proses menilai keabsahan, keaslian, serta kredibilitas suatu sumber sejarah agar dapat dijadikan dasar penulisan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik dalam penelitian sejarah bertujuan untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan tidak terdistorsi oleh kepentingan tertentu, serta mampu menggambarkan realitas sejarah yang sesungguhnya.³⁶ Kritik sumber dilakukan untuk memilah dan menyeleksi data yang relevan, akurat, serta otentik dari berbagai sumber yang telah ditemukan. Kritik sumber dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.³⁷ Kritik ekstern adalah upaya untuk menilai keaslian suatu dokumen atau sumber dari aspek fisik, seperti tahun terbit, pengarang, lembaga penerbit, dan kejelasan identitas lainnya.³⁸ Sedangkan kritik intern menitikberatkan pada isi sumber itu sendiri, yakni apakah informasi yang disampaikan dapat dipercaya, konsisten dengan fakta sejarah lainnya, serta tidak mengandung bias yang berlebihan.³⁹

Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan terhadap berbagai dokumen dan literatur, seperti buku-buku sejarah, artikel

³⁶ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 146-147.

³⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah...*, 101.

³⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, Terjemah: Nugroho Notosusanto*, (Jakarta: UI-Press, 1969), 95-97.

³⁹ G.J. Renier, *History: Its Purpose and Method*, (London: George Allen and Unwin, 1950), 79-80.

ilmiah, koran dan majalah Islam tempo dulu (seperti *Bandera Islam*, *Mustika*, *Pandji Islam*, *Al-Lisaan*, *Berita Nahdlatol 'Oelama*, dan yang lainnya), resolusi organisasi Islam, dan arsip-arsip pernyataan tokoh Islam Indonesia. Misalnya, keaslian buku *Palestina dari Zaman ke Zaman* karya K.H. Saifuddin Zuhri dapat ditelusuri dari tahun terbit (1947), penerbitnya (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), serta pengakuan dari berbagai akademisi yang mengutip buku ini dalam kajian serupa. Begitu pula dengan artikel-artikel dalam majalah *Pandji Islam*, yang terbit pada masa 1930-an hingga 1940-an, dikaji berdasarkan kredibilitas penerbitnya serta kesesuaiannya dengan konteks zaman.

Sementara itu, kritik intern dilakukan terhadap isi teks, seperti menilai sikap dan narasi yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam terkait pendudukan Yahudi di Palestina. Dalam hal ini, diperlukan kehati-hatian untuk membedakan antara opini personal, retorika perjuangan, dan pernyataan yang berdasar pada fakta. Contohnya, dalam pidato K.H. Mas Mansur pada tanggal 5 Juli 1937 dalam Peresmian Komite Palestina yang dilaksanakan dalam satu acara Rapat Akbar umat Islam di Gedung Al-Irsyad Surabaya mengenai isu Palestina, disampaikan semangat jihad dan solidaritas Islam. Hadir dalam acara tersebut lebih kurang 2000 peserta. Terdapat 33 orang utusan perhimpunan dan 13 orang wartawan dari berbagai media. Dalam acara tersebut tampil tokoh-

tokoh penting pergerakan Islam sebagai pembicara.⁴⁰ Hal ini dikritisi dengan membandingkannya dengan kondisi politik Hindia Belanda saat itu, guna mengetahui apakah pernyataan tersebut bersifat realistis atau simbolik-retoris.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dalam penelitian sejarah merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan melalui proses heuristik dan dikritisi melalui kritik sumber. Setelah fakta-fakta tersebut disaring dan dipastikan keotentikannya, seorang sejarawan memiliki tugas untuk memberikan makna terhadap peristiwa sejarah tersebut secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Interpretasi bukan sekadar pemahaman pribadi, tetapi penjabaran makna sejarah berdasarkan konteks ruang dan waktu, serta keterkaitannya dengan faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan ideologis pada masa itu.⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, interpretasi dilakukan terhadap respons para aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada periode 1917–1948. Masa ini merupakan fase krusial dalam sejarah global dan dunia Islam, karena mencakup momentum Perang Dunia I, runtuhnya Kekhalifahan Turki

⁴⁰ Berita pembentukan Komite Palestina dan Rapat Akbar di Gedung Al-Irsyad Surabaya ini diperoleh dari laporan majalah Al-Lisaan, 20 Juli 1937; majalah ini sendiri merupakan terbitan berkala dari perkumpulan Persatuan Islam yang berpusat di Bandung.

⁴¹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), 139.

Utsmani, pengesahan Deklarasi Balfour (1917), pelaksanaan Mandat Inggris atas Palestina (1920–1948), dan pendirian Negara Israel (1948).

Sikap para aktivis Islam Indonesia pada masa ini perlu dipahami tidak hanya sebagai respons emosional atau keagamaan semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika intelektual-politik umat Islam di Indonesia yang sedang berjuang merebut kemerdekaan dari kolonialisme. Oleh karena itu, penulis menginterpretasikan sikap mereka melalui pendekatan kontekstual, yang menempatkan pandangan keagamaan, semangat Pan-Islamisme, dan perjuangan antikolonial dalam satu kesatuan ideologis. Misalnya, ketika tokoh-tokoh seperti Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Natsir, Haji Agus Salim, K.H. Saifuddin Zuhri dan tokoh-tokoh lainnya menyuarkan pembelaan terhadap rakyat Palestina, hal itu tidak hanya dimotivasi oleh kesamaan agama, tetapi juga solidaritas terhadap sesama bangsa tertindas. Interpretasi ini menolak pandangan sempit bahwa dukungan terhadap Palestina semata-mata karena isu keagamaan, melainkan sebagai refleksi dari kesadaran politik global umat Islam.

Interpretasi terhadap sumber juga dilakukan dengan mencermati latar belakang penulis, konteks penerbitan, serta hubungan antara teks dengan situasi sosial-politik saat itu. Misalnya, surat kabar *Mustika*, *Het Nieuws Van Den Dag*, *De Indische Courant*, atau pidato-pidato tokoh Masyumi tidak

ditafsirkan secara harfiah, melainkan dianalisis berdasarkan konteks penerbitan dan motif ideologis yang mungkin terkandung di dalamnya.

Interpretasi dalam penelitian ini juga menggunakan teori konflik sosial dari Oberschall, yang memandang konflik sebagai proses yang terjadi akibat perebutan sumber daya, ideologi, dan kekuasaan antara kelompok sosial tertentu.⁴² Teori ini membantu penulis memahami mengapa isu Palestina menjadi begitu penting bagi umat Islam Indonesia, terutama dalam konteks munculnya kesadaran politik Islam transnasional pada awal abad ke-20. Dengan demikian, interpretasi dalam penelitian ini tidak bersifat subjektif semata, melainkan dibangun berdasarkan kaidah ilmiah dan pendekatan metodologis yang komprehensif. Interpretasi ini penting untuk mengungkap makna historis dari sikap aktivis Islam Indonesia terhadap persoalan Palestina, serta memperkaya khazanah historiografi Islam Indonesia dalam kerangka sejarah global.

Tahapan yang terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan tahapan lanjutan setelah melewati beberapa proses dalam metode penelitian sejarah. Tahap ini merujuk pada kegiatan menulis dan menyajikan hasil temuan sejarah dalam bentuk narasi ilmiah yang terstruktur.⁴³ Historiografi merupakan hasil karya

⁴² Anthony Oberschall, *Social Conflict...*, 12-14.

⁴³ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah...*, 111.

sejarawan yang menulis tulisan sejarah dengan cara merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis /diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah yang mudah dimengerti, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah penulisan yang baik dan benar.⁴⁴

Pada tahapan historiografi ini, penulis menyusun karya ilmiah secara sistematis dan konsisten agar mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan sistematis dan kronologis, yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa bab sesuai dengan alur logika dan perkembangan pembahasan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi tesis secara menyeluruh. Tesis ini diberi judul “*Respons Aktivis Islam Indonesia Terhadap Pendudukan Yahudi di Palestina 1917-1948.*” Pembahasan dalam tesis ini dibagi ke dalam lima bab utama yang disusun secara kronologis dan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, landasan teori, dan metode penelitian. Isi pokok dalam bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan penelitian, sementara uraian secara terperinci akan disajikan dalam bab-bab berikutnya.

⁴⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah...*, 148.

BAB II PALESTINA DALAM LINTASAN SEJARAH.

Bab ini berisi pembahasan Palestina dalam lintasan sejarah, dari mulai sejarah Palestina pada masa Nabi Muhammad Saw. dan Khulafa Al-Rasyidin (632-661 M), Palestina pada masa Dinasti Bani Umayyah (661-750 M), Palestina pada masa Dinasti Bani Abbasiyyah (750-1258 M), Palestina pada masa Dinasti Fatimiyyah (909-1171 M), Palestina pada masa Perang Salib (1099-1187 M), Palestina pada masa Shalahuddin al-Ayyubi dan Dinasti Ayyubiyyah (1171-1250 M), Palestina pada masa Dinasti Mamluk (1250-1517 M), Palestina pada masa Dinasti Turki Utsmaniyyah (1517-1917 M), dan Palestina pada masa pendudukan Inggris (1917-1948 M).

BAB III AWAL MULA PENDUDUKAN YAHUDI DI PALESTIAN.

Bab ini berisi pembahasan awal mula pendudukan Yahudi di Palestina, dari mulai akar zionisme yang mencakup pembahasan Zionisme dan proyek kembali ke Palestina, munculnya Zionisme Salibis, kolaborasi imperialisme agama dan politik, dekade fundamentalis sebagai awal kebangkitan Zionisme menuju Israel dan penentangan Turki Utsmani terhadap negara Yahudi. Selanjutnya munculnya Zionisme dari gagasan ke gerakan terorganisir yang mencakup pembahasan potret sosial dan politik kaum Yahudi di Eropa, Theodore Herzl dan pendirian gerakan Zionis, pertemuan Theodore Herzl dan Sultan Abdul Hamid II, dan gerakan Zionisme setelah kematian Theodore Herzl. Selanjutnya

kondisi Palestina menjelang runtuhnya Turki Utsmani yang mencakup pembahasan kemunduran Utsmani dan ketiadaan hambatan terhadap infiltrasi Zionis dan kondisi Yahudi sebagai kaum minoritas. Selanjutnya Palestina pada masa pendudukan Inggris yang mencakup pembahasan Perang Dunia I dan dampaknya, pendudukan Palestina dan kota suci Yerusalem, peran Inggris dalam merintis berdirinya negara Israel, kondisi Palestina di bawah pendudukan Inggris, dan bentuk-bentuk perlawanan di Palestina.

BAB IV RESPONS AKTIVIS ISLAM INDONESIA TERHADAP PENDUDUKAN YAHUDI DI PALESTINA 1917-1948. Bab ini berisi pembahasan respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina tahun 1917-1948, dari mulai Pan-Islamisme sebagai penghubung solidaritas aktivis Islam Indonesia terhadap isu Palestina yang mencakup pembahasan cikal bakal gerakan Pan-Islamisme, Haji sebagai sarana penguatan gerakan Pan-Islamisme, dan Pan-Islamisme di tengah arus nasionalisme. Selanjutnya respons aktivis Islam Indonesia terhadap pendudukan Yahudi di Palestina 1917-1948 yang mencakup pembahasan respons dan peran Abdul Kahar Muzakkir, rapat akbar umat Islam 5 Juli 1937 di gedung Al-Irsyad Surabaya, respons dan peran Nahdlatul Ulama dibawah kepemimpinan KH. Mahfudz Shiddiq, respons dan peran Haji Agus Salim, respons dan peran Mohammad Natsir, respons dan peran KH. Saifuddin Zuhri dan sikap kalangan sekuler.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan, disertai dengan lampiran.

